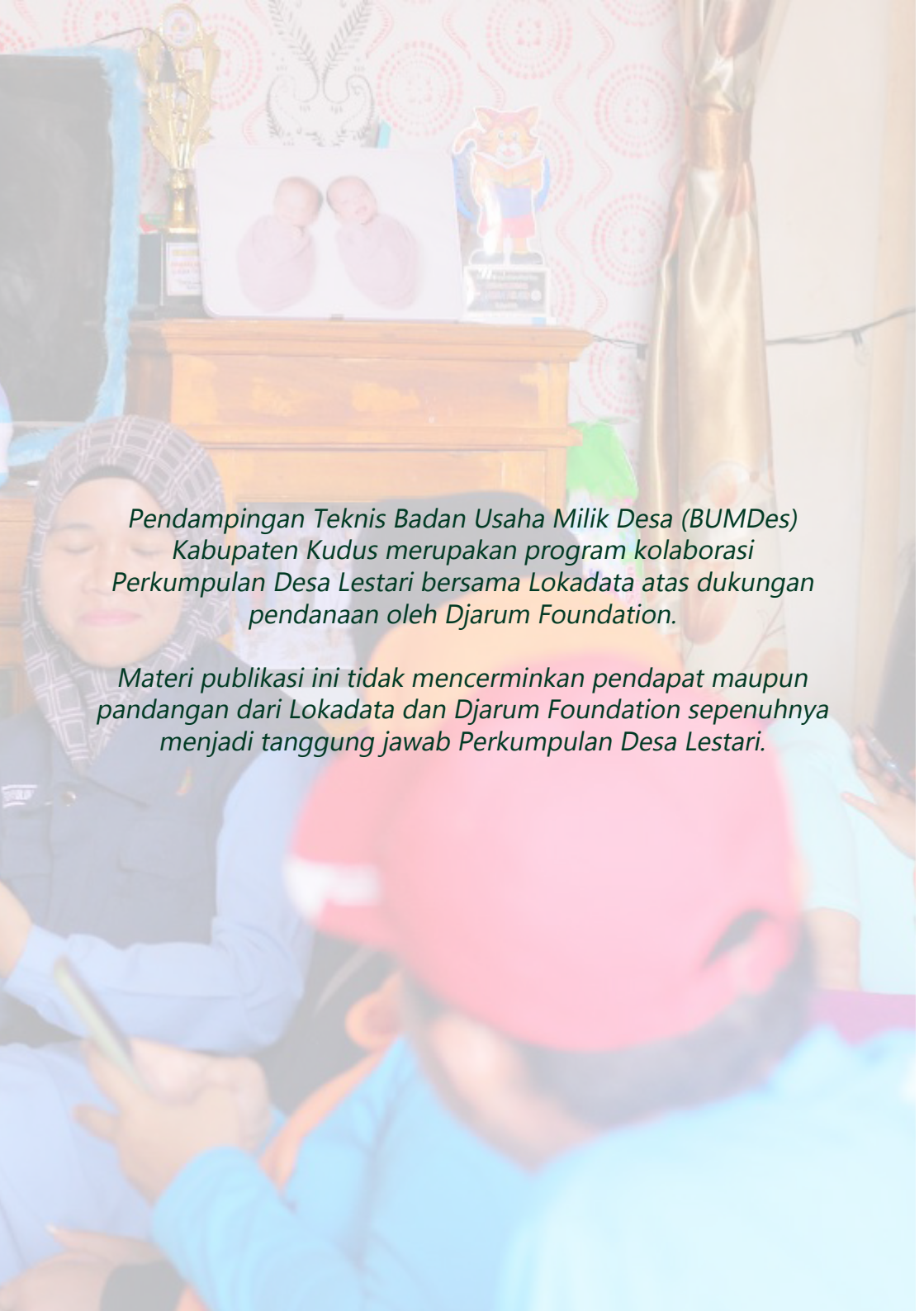




**CERITA PRAKTIK BAIK
PENDAMPINGAN TEKNIS
BUMDes
KABUPATEN KUDUS**

Village-Owned Enterprises (BUMDes)





Pendampingan Teknis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Kudus merupakan program kolaborasi Perkumpulan Desa Lestari bersama Lokadata atas dukungan pendanaan oleh Djarum Foundation.

Materi publikasi ini tidak mencerminkan pendapat maupun pandangan dari Lokadata dan Djarum Foundation sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perkumpulan Desa Lestari.

Optimalisasi Pengelolaan Sampah Terpadu Harus Dari Hulu ke Hilir

SAMPAH menjadi persoalan menahun di Kabupaten Kudus. Tumpukan sampah kerap dijumpai di beberapa titik jalan imbas pengelolaannya yang kurang baik. Akibatnya, mengganggu kenyamanan warga dan lalu lintas.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi permasalahan sampah, salah satunya pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dua BUMDes di Kudus, BUMDes Sumber Pangan Sejati Desa Jati Kulon dan BUMDes Sumber Joyo Desa Kedungdowo mengambil alih pengelolaan sampah dari komunitas. Untuk memaksimalkan pengelolaan, kedua BUMDes tersebut mendapat bantuan insinerator atau mesin pembakar sampah dari PT Djarum.

Kendati demikian, penggunaan mesin insinerator masih belum maksimal. Direktur BUMDes Sumber Pangan Sejati Imam Prayitno menyebutkan volume sampah yang diproses masih terhitung sedikit. “Kami baru mampu memproses 20 persen dari total volume sampah yang masuk ke Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). Sisanya harus dibuang ke Tem-

pat Pembuangan Akhir (TPA).” Ungkapnya.

BUMDes Sumber Joyo juga menghadapi tantangan dalam pemrosesan sampah dengan insinerator. Volume sampah yang masuk ke TPS3R cukup besar karena sampah yang masuk tidak hanya dari desa saja. “Desa Kedungdowo banyak perusahaan, dan aktivitas ekonomi lainnya yang mendatangkan orang luar desa juga menghasilkan sampah.” Kata Direktur BUMDes Sumber Joyo Syaiful Anas.

Besarnya volume sampah yang masuk tanpa diikuti dengan optimalisasi pengelolaan harus diatasi. Perkumpulan Desa Lestari sebagai pendamping desa mendorong beberapa upaya untuk meningkatkan penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir: pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, penyediaan tong organik, hingga pemberian insentif bagi petugas. Hasilnya, terdapat peningkatan volume sampah yang berhasil dikelola oleh TPS3R hingga lebih dari 50 persen.

“Kini volume sampah yang berhasil diproses TPS3R Desa Jati mencapai 70%.



Petugas TPS3R Jati Kulon sedang mengolah sampah plastik



Proses membakar sampah plastik menggunakan insinerator



Kendaraan pengangkut sampah Desa Jati Kulon

Artinya tinggal 30% yang dibuang ke TPA. Bahkan bulan Juli lalu pernah mencapai 90 persen saat kondisi sampah kering dan performa mesin bagus.” Kata Imam.

Volume sampah yang berhasil dikelola oleh TPS3R Desa Kedungdowo juga mengalami peningkatan. TPS3R berhasil mengolah sampah hingga mencapai 60 persen dari total sampah yang masuk. “Volume sampah yang dibuang ke TPA Tanjungrejo berkurang dari rata-rata 30 kontainer/bulan menjadi rata-rata 18 kontainer/bulan dengan tarif retribusi masih Rp15 ribu. Setelah kenaikan tarif retribusi menjadi Rp22 ribu ditargetkan volume sampah yang dibuang maksimal hanya 12 kontainer/bulan di musim kemarau.” Kata Mikdon Purba selaku pendamping desa dari Perkumpulan Desa Lestari.

Mikdon menilai masih diperlukan langkah-langkah strategis lain untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. BUMDes perlu memaksimalkan pemilahan sampah organik di tingkat pelanggan karena menyumbang hampir 50% dari timbulan sampah. Jika semua sampah organik dapat terpilah, maka akan mengurangi beban tersebut di TPS3R. Ia juga mendorong direktur BUMDes melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengelolaan sampah yang dijalankan secara rutin untuk memastikan prosesnya berjalan lancar setiap harinya. Artinya tinggal 30% yang dibuang ke TPA. Bahkan bulan Juli lalu pernah mencapai 90 persen saat kondisi sampah kering dan performa mesin bagus.” Kata Imam.

Volume sampah yang berhasil dikelola oleh TPS3R Desa Kedungdowo juga mengalami peningkatan. TPS3R berhasil mengolah sampah hingga mencapai 60 persen dari total sampah yang masuk. “Volume sampah yang dibuang ke TPA Tanjungrejo berkurang dari rata-rata 30 kontainer/bulan menjadi rata-rata 18 kontainer/bulan dengan tarif retribusi masih Rp15 ribu. Setelah kenaikan tarif retribusi menjadi Rp22 ribu ditargetkan volume sampah yang dibuang maksimal hanya 12 kontainer/bulan di musim kemarau.” Kata Mikdon Purba selaku pendamping desa dari Perkumpulan Desa Lestari.

Mikdon menilai masih diperlukan langkah-langkah strategis lain untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. BUMDes perlu memaksimalkan pemilahan sampah organik di tingkat pelanggan karena menyumbang hampir 50% dari timbulan sampah. Jika semua sampah organik dapat terpilah, maka akan mengurangi beban tersebut di TPS3R. Ia juga mendorong direktur BUMDes melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengelolaan sampah yang dijalankan secara rutin untuk memastikan prosesnya berjalan lancar setiap harinya. (LA)

Pasar Sarwono, Dari Jauh Jadi Rihuh

LOKASI Desa Wonosoco jauh dari jalan utama dan pusat Kota Kudus. Tidak ada desa wisata penyangga sehingga jarang dikunjungi. Desa ini juga sering terdampak banjir bandang. Namun dibalik itu, Desa Wonosoco menyimpan beragam potensi yang bisa dikembangkan.

Hutan jati yang cukup luas di Desa Wonosoco menjadi inspirasi pengembangan ekowisata. Pohon jati yang mulanya milik penyewa kemudian tumbuh subur di sana. Penyewa pun memberikan hak pengelolaannya kembali ke desa. “Dari sinilah muncul ide untuk mengelola dengan tidak menebangnya. Agar menjadi daya tarik, dikemas menjadi wisata ‘Alas Jati Sewu’, yang berarti wisata diantara ribuan pohon jati.” Tutur Direktur BUMDes Wonorekso Tri Budi Wahono.

Mulanya wisata Alas Jati Sewu mulai dipasarkan ke masyarakat lokal Kudus. Perlahan pengunjung mulai berdatangan di hari-hari libur. Seiring berjalannya waktu, pengurus BUMDes bersama pendamping dari Perkumpulan Desa Lestari berinovasi membuka pasar yang menjajakan kudapan lokal bertajuk Pasar Sarwono. Ide Pasar Sarwono mendapat persetujuan forum antara BUMDes, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Pemerintah Desa, dan BPD.

BUMDes dibantu Pokdarwis mengelola

dan menata pedagang lokal untuk berjualan kudapan lokal khas Wonosoco seperti wedang coro dan duda kemul. Pengelola turut mengundang stakeholders Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kepala Desa, Karang Taruna, dan BUMDes sekecamatan Undaan untuk meramaikan. Pada gelaran pertama, pengelola BUMDes mencatat sekitar 300 orang berkunjung hingga semua kudapan yang dijual oleh 11 pedagang ludes. Sudarsih, salah satu pedagang jajanan di Pasar Sarwono, mengaku adanya gelaran ini dapat menambah pendapatannya sebagai pedagang rumahan. “Adanya Pasar Sarwono cukup membantu pendapatan saya sebagai ibu rumah tangga. Meskipun pendapatan naik turun, sepi-sepiunya jualan masih balik modal.” Ungkap Sudarsih.

Melihat antusiasme pengelola, pedagang, dan pengunjung, BUMDes Wonorekso berkomitmen mengadakan gelaran Pasar Sarwono satu kali setiap bulan. Dengan harga tiket Rp5 ribu termasuk parkir, pengunjung dapat menikmati suasana pagi di Pasar Sarwono. Pengelola juga berinovasi dengan memperlakukan transaksi menggunakan koin kayu. Satu koin kayu bernilai Rp2 ribu. Saat ini BUMDes sudah menyiapkan 20 ribu keping untuk tiap gelaran Pasar Sarwono.

Sejak gelaran pertama, Pasar Sarwo-



Masyarakat memadati salah satu pedagang jajanan di Pasar Sarwono

no berhasil menjadi tujuan wisata lokal di Kudus. Pada tahun 2023, rata-rata pengunjung sekitar 750 orang. Rata-rata jumlah pengunjung naik mencapai 1,1 ribu orang pada 2024. Pada tahun 2025, terjadi lonjakan pengunjung di bulan Juni hingga Juli sebanyak 4,5 ribu orang. BUMDes Wonorekso mencatat perputaran uang pada sekali gelaran Pasar Sarwono yang terakhir mencapai Rp40 juta.

Meski Pasar Sarwono dinilai berjalan lancar dan sukses, tetapi pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan. “Banyak yang mengeluh soal jam operasional yang dibatasi. Jam operasional dibuka jam 07.00. Tetapi karena antusias jam 06.30 sudah buka karena crowded. Kultur budaya wisatawan wilayah Pantai Utara (Pantura) cenderung lebih agresif, tidak mau antri kurangnya budaya memilah sampah. Yang bisa dilakukan adalah memberikan informasi yang jelas dan memberikan himbauan sesuai dengan ketentuan Sarwono.” Kata Tri.

Tantangan lainnya adalah tentang pola pikir masyarakat terhadap wisata. Pendamping dari Sirkula Indonesia Danang Ramadhana, menilai perlu menggeser cara pandang dari melihat wisata sebagai kegiatan sesaat atau acara seremonial budaya menjadi usaha kolektif jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, disiplin, dan kerjasama. “Banyak masyarakat masih memiliki ekspektasi hasil instan dan menganggap wisata hanya tanggung jawab kelompok tertentu. Karena itu, penting membangun kepercayaan melalui pengelolaan yang transparan, partisipatif, serta

memberikan contoh nyata bahwa manfaat ekonomi bisa dirasakan secara kolektif. Inklusivitas dan kolaborasi multipihak menjadi kunci agar masyarakat merasa memiliki dan terlibat aktif dalam pengembangan wisata desa.” ungkap Danang.

Pasar Sarwono berhasil menarik perhatian masyarakat Kudus. Lina Ermawati sudah beberapa kali mengunjungi Pasar Sarwono. Ia mengaku dimanjakan dengan pemandangan dan sajian kuliner lawas dengan diiringi hiburan live music serta arena bermain untuk anak-anak sehingga Pasar Sarwono bisa menjadi alternatif wisata bersama keluarga.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Alimin, Duta Wisata Kudus. Dirinya juga sudah tiga kali berkunjung bersama beberapa lingkaran pertemanan yang berbeda. Menurut Alimin, Pasar Sarwono menyuguhkan suasana yang sejuk karena banyak pohon. Meski jauh, lanjut Alimin, pengunjung ramai dan Pasar Sarwono menawarkan pengalaman berbeda dengan transaksi koin kayu.

“Kami berharap BUMDes bisa menyiapkan koin kayunya lebih banyak lagi karena kehabisan, banyak yang ngga dapat. Sebagai Dibuat lebih meriah lagi dengan mempromosikan lewat media sosial. Perlu menggandeng pelaku-pelaku wisata yang lain untuk turut mempromosikan dan menerapkan sapa pesona.” Tutup Alimin.

Pasar Sarwono menjadi bukti bahwa inovasi berbasis potensi lokal mampu menghidupkan kembali desa yang sepi.

Gelaran tersebut menghadirkan ruang ekonomi bagi masyarakat setempat sekaligus ruang merawat budaya, menjadikan identitas Desa Wonosoco sebagai desa wisata. Konsistensi pengelolaan dan kolaborasi multipihak menjadi kunci agar Pasar Sarwono tetap eksis secara mandiri dan berkelanjutan.

“Banyak masyarakat masih memiliki ekspektasi hasil instan dan menganggap wisata hanya tanggung jawab kelompok tertentu. Karena itu, penting membangun kepercayaan melalui pengelolaan yang transparan, partisipatif, serta memberikan contoh nyata bahwa manfaat ekonomi bisa dirasakan secara kolektif. Inklusivitas dan kolaborasi multipihak menjadi kunci agar masyarakat merasa memiliki dan terlibat aktif dalam pengembangan wisata desa.” ungkap Danang.

Pasar Sarwono berhasil menarik perhatian masyarakat Kudus. Lina Ermawati sudah beberapa kali mengunjungi Pasar Sarwono. Ia mengaku dimanjakan dengan pemandangan dan sajian kuliner lawas dengan diiringi hiburan live music serta arena bermain untuk anak-anak sehingga Pasar Sarwono bisa menjadi alternatif wisata bersama keluarga.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Alimin, Duta Wisata Kudus. Dirinya juga sudah tiga kali berkunjung bersama beberapa lingkaran pertemanan yang berbeda. Menurut Alimin, Pasar Sarwono menyuguhkan suasana yang sejuk karena banyak pohon. Meski jauh, lanjut Alimin, pengunjung ramai dan Pasar Sarwono menawarkan pengalaman berbeda dengan transaksi koin kayu.

“Kami berharap BUMDes bisa menyiapkan koin kayunya lebih banyak lagi karena kehabisan, banyak yang ngga dapat. Sebagai Dibuat lebih meriah lagi dengan mempromosikan lewat media sosial. Perlu menggandeng pelaku-pelaku wisata yang lain untuk turut mempromosikan dan menerapkan sapa pesona.” Tutup Alimin.

Pasar Sarwono menjadi bukti bahwa inovasi berbasis potensi lokal mampu menghidupkan kembali desa yang sepi. Gelaran tersebut menghadirkan ruang ekonomi bagi masyarakat setempat sekaligus ruang merawat budaya, menjadikan identitas Desa Wonosoco sebagai desa wisata. Konsistensi pengelolaan dan kolaborasi multipihak menjadi kunci agar Pasar Sarwono tetap eksis secara mandiri dan berkelanjutan.



Gardu PAMSIMAS Desa Garung Lor

BUMDes Makmur Mandiri Wujudkan Kemandirian Air Bersih Desa Garung Lor

AIR BERSIH telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Keberadaan air semakin vital karena masyarakat sendiri memerlukan air untuk konsumsi harian. Besarnya kebutuhan air bersih perlu diimbangi dengan sistem pengelolaan yang baik untuk memastikan kuantitas dan kualitas air terjaga.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai salah satu entitas yang dapat mengelola air bersih melalui Pengelola Air Minum Desa (PAMDes). BUMDes Makmur Mandiri Desa Garung Lor Kudus mengelola PAMDes berawal dari program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) lalu beralih menjadi PAMDes setelah

BUMDes berdiri dengan jumlah sumur masih terbatas.

“Awalnya desa hanya memiliki satu sumur yang dikelola BUMDes. Seiring berjalan waktu, Pemerintah Desa membangun dua sumur lagi, berikut dengan penampung air dan jaringan pipa distribusi lalu pengelolaannya diserahkan ke BUMDes,” ungkap Direktur BUMDes Makmur Mandiri Abdul Haris.

Upaya PAMDes menjadi angin segar bagi masyarakat Desa Garung Lor. Kebutuhan air bersih mereka dapat terpenuhi. Keberadaan PAMDes oleh BUMDes Makmur Mandiri menjawab solusi di tengah tantangan dalam memperoleh sumber air. Hal ini dibenarkan oleh Narto, salah satu pelanggan PAMDes.

“Apalagi sekarang untuk membuat sumur galian susah dan kalau musim kemarau biasanya kering. Selain itu, kualitas suplai air dari PAMDes menjadi lebih terjamin kelancarannya, biaya jauh lebih murah, dan pembayarannya mudah karena ada petugas yang mengurus.” Kata Narto.

Saat ini PAMDes yang dikelola oleh BUMDes memiliki 900 pelanggan sambungan rumah (SR). Dalam pengelolaannya, BUMDes Makmur Mandiri menerapkan tarif retribusi secara pro-

gresif dan memanfaatkan aplikasi data setoran pelanggan setoran. Menurut Pendamping Lapangan Mikdon Purba, langkah-langkah ini merupakan praktik baik pengelolaan yang dapat dilakukan BUMDes.

“Penerapan tarif progresif berpotensi menambah pendapatan BUMDes. Selain itu bisa mencegah terjadinya pelanggan yang menumpang ke meteran tetangganya dengan tujuan untuk menghindari biaya pemasangan sambungan.” Ujar Mikdon. Dia menambahkan penggunaan aplikasi data setoran secara online akan meminimalisir tagihan yang tidak sampai ke BUMDes dan data selalu aktual.

Pengelolaan PAMDes oleh BUMDes Makmur Mandiri membuktikan bahwa desa mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya secara mandiri. Dukungan sumur tambahan serta sistem tarif progresif dan pembayaran yang modern juga menunjukkan bahwa PAMDes dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan komitmen pengelolaan yang profesional dan partisipasi masyarakat, PAMDes diharapkan dapat terus berkembang hingga menjadi model pengelolaan air bersih desa yang mandiri, transparan, dan berkelanjutan. (LA)

Banyak Tantangan, Ket Dapat Resp

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masa kini mulai berani melangkah untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Sejumlah BUMDes memanfaatkan lahan dan ruang kosong untuk bertani sebagai strategi menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan ekonomi lokal. Apalagi upaya ketahanan pangan ini didukung oleh kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan minimal 20 persen dana desa.

BUMDes Manggala Karya Desa Cendono, misalnya, melihat kebijakan ini sebagai peluang. Direktur BUMDes, Arif Risdiyanto, menyebut bukan tanpa alasan BUMDes masuk ke sektor pertanian. “Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pemanfaatan dana desa tahun 2025. Ini menjadi peluang bagi BUMDes untuk berusaha, apalagi kami juga memiliki pengalaman di bidang pertanian dan potensi desa yang mendukung,” ujarnya.

BUMDes Manggala Karya memilih komoditas jamur tiram dan selada hidroponik. Selain budidayanya relatif mudah, kedua komoditas tersebut memiliki siklus panen cepat dan tidak membutuhkan lahan luas. Namun, proses merintis usaha ini tidak berjalan mulus. Keterbatasan sumber daya manusia dan kualitas media tanam menjadi kendala utama yang berdampak pada hasil panen yang belum optimal pada tahap



Pengurus BUMDes Manggala Karya Desa Cendono A

awal merintis.

“Di awal hasil panen belum mencapai target. Banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari cuaca hingga kualitas media tanam,” jelas Arif. Untuk mengatasi hal tersebut, pengurus BUMDes melakukan evaluasi rutin, belajar dari pelaku usaha lain, hingga mulai memproduksi media tanam sendiri. Hasilnya, produksi perlahan meningkat dan mulai stabil.

Ketahanan Pangan Tetap Positif



Ahmad Syaifudin sedang memanen selada hidroponik

Cerita serupa juga datang dari Desa Purworejo. BUMDes Sendang Karya mengembangkan budidaya jamur tiram dan pisang raja bulu dengan memanfaatkan tanah kas desa yang sebelumnya tidak produktif. Direktur BUMDes Khoirul Umam mengungkapkan bahwa tantangan terbesar justru datang dari aspek tenaga kerja. “Kami kesulitan merekrut tenaga kerja dari warga karena gaji yang masih kecil. Sudah dibuka

lowongan, tapi banyak yang mundur setelah tahu nominalnya,” katanya.

Meski menghadapi tantangan, respons masyarakat terhadap program ini cenderung positif. Warga mulai menunjukkan ketertarikan untuk belajar. Bahkan sebagian terlibat dalam proses produksi. Hal ini menjadi sinyal bahwa ketahanan pangan berbasis desa tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan, melainkan juga membuka ruang pembelajaran ekonomi bagi masyarakat.

Pendamping desa dari Perkumpulan Desa Lestari Evalina menilai bahwa program ini memiliki nilai strategis jangka panjang. “Melalui pengelolaan ketahanan pangan oleh BUMDes, ketahanan pangan tidak hanya soal memenuhi kebutuhan, tetapi juga menjadi sarana belajar mengelola usaha dan mendorong perputaran ekonomi desa,” ujarnya.

Harapan besar disematkan pada keberlanjutan program ini untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal sekaligus menghasilkan keuntungan dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Dengan pengelolaan yang semakin matang, unit usaha ketahanan pangan diharapkan dapat berkembang, bahkan menjadi model yang dapat direplikasi oleh desa lain. (LA)

Internet Desa, Dari K Penggerak Ek

KETERBATASAN akses internet kerap jadi hambatan utama bagi desa untuk berkembang, terutama di era digital. Namun, Desa Japan menunjukkan bahwa ketika konektivitas dan jaringan internet yang dibangun secara mandiri melalui BUMDes mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Direktur BUMDes Tunggak Jati Japan Ahmad Khakim Sulityono menuturkan bahwa pilihan untuk membangun usaha internet bukan tanpa perhitungan. "Usaha ini kami nilai matematis. Artinya, pendapatannya bisa diprediksi dan berkelanjutan. Sebelumnya kami mencoba usaha perdagangan kopi, tetapi itu masih spekulatif. Di sisi lain, kami melihat kebutuhan internet di desa sangat tinggi. Warga punya potensi ekonomi dari pertanian, kreativitas, dan wisata. Kalau akses internet lambat, semua potensi itu sulit berkembang," ungkapnya. Pengembangan jaringan dimulai setelah BUMDes mengamankan kerja sama dengan penyedia layanan internet resmi. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap hingga layanan kini tak hanya menjangkau warga Desa Japan, tetapi meluas hingga luar desa. Tercatat jumlah pelanggan aktif mencapai 455 orang pada 2025. Bahkan kontribusi usaha ini mencapai 90 persen dari total pendapatan BUMDes. Pencapaian ini



Petugas pengelola sedang memperbaiki infrastruktur jaringan di Desa Japan

kebutuhan Dasar Jadi ekonomi Lokal

menandakan peran strategis BUMDes dalam menggerakkan ekonomi desa.

Ali Imron, salah satu pelanggan, mengaku internet menjadi titik balik kehidupannya. “Saya dulu merantau, bekerja serabutan. Saat pandemi, saya pulang dan mulai usaha online. Berkat internet BUMDes, saya bisa membuka usaha dari satu lapak, lalu berkembang jadi empat lapak dengan delapan pekerja. Dari situ, kami bisa dapat omzet puluhan juta per bulan,” katanya. Ia berharap BUMDes terus menjaga stabilitas layanan agar usaha digital di desa tetap berjalan.

Manfaat internet juga terasa di sektor wisata. Kawasan wisata religi Rejenu yang sebelumnya minim akses kini terhubung jaringan internet BUMDes. Komeng, salah satu pedagang di area wisata, menceritakan perubahan besar yang dirasakannya. “Dulu kami terputus dari dunia luar. Sekarang kami bisa jual paket internet untuk wisatawan, dan dari situ saja saya bisa dapat tambahan sampai satu juta rupiah per bulan. Wisatawan juga jadi lebih ramai karena bisa langsung live atau mengunggah aktivitas mereka di sini,” ujarnya.

Di balik keberhasilan unit usaha penyedia internet, tantangan tetap ada. Ahmad menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan regulasi. “Kami harus terus memper-

barui pengetahuan dan sistem, dari perangkat jaringan sampai aplikasi manajemen pelanggan. Selain itu, kami juga memberikan edukasi kepada warga tentang perubahan teknologi, supaya mereka tidak tertinggal,” tambahnya.

Dengan langkah ini, internet tak hanya fasilitas semata. Internet telah menjadi fondasi ekonomi desa, dari peluang usaha digital, peningkatan pariwisata, hingga dukungan terhadap pendidikan dan kegiatan sosial. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana akses digital dapat menjadi salah satu faktor percepatan perubahan di desa. (LA)



Menguatkan Usaha dan Memperluas Manfaat Desa Lewat Kolaborasi

UPAYA memperkuat kemandirian ekonomi desa kini semakin terlihat melalui kolaborasi lintas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kemitraan dengan berbagai lembaga. Sejumlah BUMDes mulai membangun jejaring dan kerja sama untuk memaksimalkan operasional serta mengembangkan unit usaha baru yang lebih potensial untuk berkelanjutan.

BUMDes Amanah Papringan menggandeng BUMDes Tunggak Jati Japan dalam pengembangan usaha internet desa. Kerja sama ini menjadi solusi atas keterbatasan kapasitas teknis yang dimiliki Papringan. “Kerja sama usaha internet ini sangat membantu kami karena BUMDes Japan mendukung dari sisi teknis yang sebelumnya belum kami kuasai. Kami mendapatkan suplai peralatan, bandwidth, keterampilan, bahkan dukungan finansial. Ini menjadi unit usaha baru bagi kami yang sebelumnya belum pernah ada,” ungkap Nor Khabibi, Bendahara BUMDes Amanah Papringan dalam satu kesempatan.

BUMDes Tunggak Jati Japan memposisikan diri sebagai pelaku usaha dan penghubung ekosistem kolaborasi yang

lebih luas. Mereka bermitra dengan penyedia layanan internet serta mengajak BUMDes lain sebagai reseller untuk memperluas jangkauan pasar.

“Kolaborasi ini bukan sekadar hubungan bisnis, tetapi juga ruang untuk saling belajar. Kami beri pelatihan dan pendampingan teknis kepada BUMDes mitra, sehingga usaha bisa berjalan dan berkembang bersama. Tantangan terbesarnya menjaga kepercayaan karena keberlanjutan kerja sama sangat bergantung pada komitmen kedua belah pihak,” jelas Ahmad Khakim Sulityono, Direktur BUMDes Tunggak Jati Japan.

Praktik serupa juga dilakukan oleh BUMDes Sendang Karya Purworejo. BUMDes mengembangkan usaha budidaya jamur tiram dan pisang melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pelaku usaha. Kolaborasi ini berorientasi pada transfer pengetahuan dan bisnis usaha.

“Melalui kerja sama dengan Fakultas Pertanian UMK dan mitra usaha, kami dapat pendampingan teknis, penyediaan bahan baku, hingga akses pasar. Dari sini lahir unit usaha baru yang



*Direktur BUMDes Tunggak Jati Japan Ahmad Khakim Sulistyono (kiri) dan
Direktur BUMDes Amanah Papringan Nor Khabibi (kanan)*

sebelumnya nggak ada. Kolaborasi ini memberi manfaat pada peningkatan kapasitas sekaligus keuntungan ekonomi,” ujar Direktur BUMDes Sengdang Karya Choirul Umam.

Kendati demikian, kolaborasi tidak lepas dari tantangan di lapangan. Perbedaan kapasitas antarbadan usaha, keterbatasan waktu program, hingga ketergantungan pada figur tertentu seringkali menjadi hambatan. Project Manager Perkumpulan Desa Lestari Eko Sujatmo menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dalam menjaga keberlanjutan kerja sama.

“Kolaborasi harus dilekatkan pada institusi, bukan individu. Ketika kerja sama

hanya bergantung pada figur tertentu, kolaborasi berpotensi terhenti saat terjadi pergantian. Perjanjian kerja sama yang jelas dan komitmen bersama menjadi kunci utama supaya kolaborasi dapat berjalan jangka panjang,” tegasnya.

Kolaborasi yang telah dilakukan, baik antarbadan usaha maupun BUMDes dengan lembaga nonbadan usaha, menunjukkan kolaborasi menjadi strategi penting dalam mempercepat pertumbuhan BUMDes. Selain membuka peluang usaha, kolaborasi mampu memperkuat kapasitas, memperluas jaringan, dan memastikan ekonomi desa terus berputar secara berkelanjutan. (LA)



Sesi diskusi saat Pelatihan Dasar Pengelola BUMDes bersama fasilitator

SELAMA enam tahun terakhir, pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kudus oleh Lokadata yang berkolaborasi dengan Perkumpulan Desa Lestari menunjukkan perjalanan yang panjang dan tidak linier. Pendampingan ini penuh dengan proses pembelajaran yang membentuk fondasi ekonomi desa. Program yang dimulai sejak 2019 ini tidak hanya berorientasi pada pembentukan BUMDes secara administratif, melainkan juga pada penguatan kelembagaan, kapasitas operasional, hingga keberlanjutan usaha berbasis kebutuhan lokal dan potensi desa.

Program Manager dari Perkumpulan Desa Lestari Eko Sujatmo menilai pen-

dampingan ini sebagai peluang strategis bagi desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitasnya. Ia menegaskan bahwa pendampingan tidak sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga proses membangun sistem kerja yang berkelanjutan.

“Pendampingan teknis menjadi bertahap dan berulang, fokus awal lebih banyak pada membangun fondasi kelembagaan dibanding ekspansi usaha. Pendampingan harus dilakukan secara intensif, terlibat langsung dalam operasional disesuaikan dengan kapasitas SDM yang ada. Karena karakteristik usaha dominan layanan, diarahkan pada stabilitas layanan. Pendampingan keuangan juga butuh waktu lebih pan-

Refleksi Enam Tahun Pendampingan BUMDes di Kudus: Perkuat Fondasi, Adaptif terhadap Dinamika, dan Harapan Kemandirian Desa

jang, menyampaikan hasilnya dalam bentuk laporan dan evaluasi kepada pemerintah desa agar ada dukungan modal.” Kata Eko.

Namun, pendampingan ini tidak lepas dari berbagai dinamika. Dari sisi kelembagaan, banyak BUMDes awalnya hanya bersifat formal administratif. Sementara dari sisi sumber daya manusia, keterbatasan waktu dan kompetensi pengurus memaksa pendekatan pendampingan beralih menjadi praktik langsung di lapangan. Selain itu, tantangan regulasi di tingkat daerah sempat menjadi penghambat serius.

Researcher and Analyst Lokadata Imron Fauzi menekankan bahwa pendekatan kolaboratif adalah kunci menghadapi tantangan-tantangan tersebut. “Sebetulnya perlu kolaborasi. Jadi program ini tidak bisa berjalan sendiri. Kita selalu berbagi peran dengan dinas terkait, Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, hingga pendamping dari Kementerian Desa. Mereka cukup strategis, khususnya dalam mengawal implementasi dana desa. Selain itu, pendekatan yang

dilakukan harus partisipatif sejak perencanaan, melibatkan aktor desa agar tidak terjadi ketergantungan dan mereka bisa mandiri.” Ujar Imron.

Dampak pendampingan mulai terlihat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas BUMDes. Hingga 2025, jumlah BUMDes berbadan hukum meningkat signifikan, dengan sebagian besar telah memiliki unit usaha aktif. Transformasi ini juga dirasakan langsung oleh pelaku di tingkat desa.

Direktur BUMDes Wonorekso, Tri Budi Wahono, menggambarkan perubahan tersebut sebagai titik balik yang menentukan. “Semula BUMDes mati suri dari 2017 sampai 2021. Setelah ada pendampingan, mulai ada kegiatan. Awal 2022 menjadi titik balik BUMDes. Dari yang tidak ada aktivitas usaha, sekarang bisa berjalan dengan manajemen yang lebih teratur dan terarah. Kepercayaan masyarakat juga mulai tumbuh, meskipun masih ada tantangan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.” Katanya.

Hal serupa disampaikan Nor Khabibi dari BUMDes Amanah Papringan yang menyoroti peningkatan kapasitas internal dan kepercayaan publik. Nor melihat pengelolaan usaha melalui BUMDes semakin dipahami, arah pengelolaan usaha dan keuangan semakin jelas, dan kemampuan komunikasi dengan pemerintah desa semakin baik, “Kepercayaan masyarakat mulai muncul karena pengelola dianggap kredibel, dan ini menjadi modal penting untuk pengembangan ke depan.” Ungkap Nor.

Tantangan terbesar yang dihadapi BUMDes di masa depan adalah menjaga keberlanjutan setelah fase pendampingan berakhir. Kemandirian BUMDes kunci utama keberhasilan BUMDes. Tanpa kemandirian, risiko stagnasi BUMDes bahkan kegagalan usaha masih cukup besar. Kolaborasi Perkumpulan Desa Lestari bersama Lokadata dalam program pendampingan sudah selesai tetapi akhir ini menjadi titik awal BUMDes untuk berdiri dan terus berkembang dengan kekuatan sendiri menuju kemandirian dan keberlanjutan. (LA)



Peserta Pelatihan Dasar Pengelola BUMDes Kabupaten Kudus



Eko Sujatmo mengisi sesi penyusunan perencanaan usaha ketahanan pangan



Peserta pelatihan dari 14 desa di Kabupaten Kudus bersama Vice President Djarum Foundation dan para narasumber sesuai Pelatihan Dasar Pengelola BUMDes di Kabupaten Kudus pada 2021

